

**ANALISIS PENGUKURAN BELANJA DAERAH DALAM
MENINGKATKAN KINERJA BELANJA PADA
BPKAD KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI



**Nama : Rosita
NIM : 222015004**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**ANALISIS PENGUKURAN BELANJA DAERAH DALAM
MENINGKATKAN KINERJA BELANJA PADA
BPKAD KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Nama : Rosita
NIM : 222015004**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Pengukuran Belanja Daerah Dalam Meningkatkan
Kinerja Belanja Pada BPKAD Kota Palembang
Nama : Rosita
NIM : 222015004
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada tanggal, 21-03- 2019

Pembimbing I,



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 020604630/784021

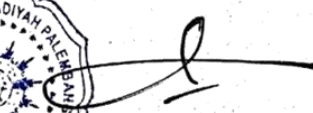
Pembimbing II,



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan
u.b. Ketua Program Studi Akuntansi




Betri, S.E., M.Si., AK., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rosita

NIM : 22 2015 004

Progam Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan



Abstrak

Rosita / 222015004 / Analisis Pengukuran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Belanja Pada BPKAD Kota Palembang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis pengukuran belanja daerah dalam Meningkatkan Kinerja Belanja Pada BPKAD Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah penelitian dekriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan tehnik pengumpulan data yaitu dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dapat diambil kesimpulan antara lain untuk analisis varians belanja daerah menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja Kota Palembang dapat dikatakan baik. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya realisasi belanja yang melebihi anggaran belanja. Untuk rasio pertumbuhan pada belanja daerah dikatakan sudah baik dikarenakan pencapaian tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja mengalami pertumbuhan yang positif bagi kinerja belanja. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja belanja yang baik bagi pemerintah Kota Palembang. Untuk rasio efisiensi menunjukkan bahwa pemerintah Kota Palembang telah melakukan efisiensi anggaran belanja dikarenakan realisasi belanja lebih kecil dari anggaran belanja. Capaian belanja daerah kurang dari 100 % menunjukkan bahwa kinerja belanja yang baik. Tingkat keserasian belanja daerah Kota Palembang tahun 2011-2017 dikatakan kurang serasi, karena rata-rata rasio keserasiannya sebesar 22,10 %. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja belanja pada pemerintah Kota Palembang sudah baik, walaupun ada beberapa tahun periode yang belanja modalnya tidak serasi. Untuk rasio aktifitas bahwa rata-rata rasio aktifitas belanja operasi sebesar 70,46 % dan rata-rata rasio aktifitas belanja modal sebesar 28,27 %. Dilihat dari segi kinerjanya bahwa kinerja belanja sudah baik, hal ini dikarenakan anggaran belanja daerah yang terealisasi dari yang telah dianggarkan.

Kata kunci : belanja daerah, kinerja belanja

Abstract

Rosita / 222015004 / Analysis of Measurement of Regional Expenditures in Increasing Shopping Performance at BPKAD Palembang City

This study aims to determine the analysis of the measurement of regional expenditure in Increasing Shopping Performance at BPKAD Palembang City. This type of research is descriptive research. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Palembang. The data used is secondary data with data collection techniques, namely documentation. Based on the results of research conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Palembang, conclusions can be drawn, among others, for the analysis of regional expenditure variance, which shows that the financial performance of Palembang City's expenditure can be said to be good. This is indicated by the absence of expenditure realization that exceeds the budget. The ratio of growth to regional expenditure is said to have been good because the achievement of the growth rate of realization of the expenditure budget experienced positive growth for spending performance. This condition shows that shopping performance is good for the government of Palembang City. The efficiency ratio shows that the city of Palembang has made efficient budget expenditures because the realization of spending is smaller than the budget. Regional expenditure achievements of less than 100% indicate that shopping performance is good. The level of harmony in the regional expenditure of Palembang City in 2011-2017 is said to be less harmonious, because the average harmony ratio is 22.10%. This condition illustrates that the performance of spending on the government of Palembang City has been good, although there have been several years in which capital expenditure has not been harmonious. For activity ratios, the average ratio of operating expenditure activities is 70.46% and the average ratio of capital expenditure activities is 28.27%. In terms of performance, spending performance is good, this is because the regional budget is realized from what has been budgeted.

Keywords: regional expenditure, shopping performance

PRAKATA



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **Analisis Pengukuran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang** ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Adapun penelitian ini terbagi menjadi lima bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran. Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tuaku tercinta, Bapakku Asla dan Ibuku Yama Asni, mbakku Rusmala dan Rusdiana serta kakakku Rozali yang telah memberi semangat, mendoakan dan memberikan dorongan baik materil maupun spirit yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si & Ibu Nina Sabrina, S.E.,_M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan

ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta Staf karyawan/karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA dan Ibu Nina Sabrina, SE., M.Si selaku ketua prodi dan sekretaris program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Drs. Sunardi, S.E., M.Si & Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi saya.
5. Bapak Betri, SE., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing akademik saya.
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kepala serta pegawai di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang yang dengan tulus mengarahkan dan membantu saya.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam

menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas budi untuk seluruh bantuan yang telah diberikan guna menyelesaikan skripsi ini. Aamiin.

Palembang,.....2019

Rosita

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Pustaka.....	10
1. Landasan Teori	10
a. Kinerja belanja	10
1) Pengertian Kinerja belanja	10

2) Tujuan Pengukuran Kinerja	11
3) Manfaat Penilaian Kinerja	12
4) Indikator Kinerja Belanja.....	13
5) Elemen Pokok Pengukuran Kinerja.....	13
b. Belanja Daerah	14
1) Pengertian Belanja Daerah.....	14
2) Klasifikasi Belanja Daerah	16
3) Kebijakan atas Pemerintah Daerah.....	22
4) Pengakuan Belanja	29
5) Pengukuran Belanja.....	30
B. Penelitian Sebelumnya	33

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Operasionalisasi Variabel	40
D. Data Digunakan.....	40
E. Metode Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data dan Teknik Analisis	42
1. Analisis Data	42
2. Teknik Analisis.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	45
1. Gambaran Umum BPKAD Provinsi Kota Palembang	45

2. Visi dan Misi	46
3. Struktur Organisasi	48
4. Tugas Pokok dan Fungsi	51
B. Pembahasan Hasil Penelitian	60
1. Analisis Varians Belanja	61
2. Analisis Pertumbuhan Belanja.....	63
3. Analisis Rasio Efisiensi Belanja.....	70
4. Analisis Rasio Keserasian Belanja	76
5. Analisis Rasio Aktifitas.....	78
 BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan maka kinerjanya jelek (Windhu, 2018: 54).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisiensi dan ekonomis tetapi sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu kegiatan. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik (Mardiasmo, 2009: 121).

Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang pada pokoknya memberi batasan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban

daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Undang-undang membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Kewenangan yang dimiliki akan membuat daerah lebih leluasa dalam menyusun anggaran dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Ika, 2018).

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah dengan klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode (Ika, 2018). Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung 1 januari sampai 31 desember.

Pemerintah memiliki berbagai anggaran diantaranya anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Anggaran pendapatan adalah suatu perkiraan mengenai batas penerimaan tertinggi keuangan pemerintah sebagai sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja negara. Anggaran belanja adalah suatu perkiraan mengenai batas pengeluaran tertinggi keuangan pemerintah bagi pembiayaan pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah untuk satu tahun.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang melakukan pengelolaan anggaran belanja mulai dari menetapkan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi anggaran belanja. Perencanaan anggaran belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan BPKAD

Kota Palembang pada satu tahun berikutnya, dalam melaksanakan anggaran belanja sering terjadi selisih anggaran. Perbedaan antara angka anggaran (*budget*) dengan realisasi ini disebut penyimpangan atau *variance*, selisih lebih yang ditimbulkan oleh anggaran belanja biasa disebut *favourable* dan selisih kurang biasanya disebut *unfavourable*.

Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan realisasi anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar (Ramli, 2016: 19).

Selain memiliki berbagai anggaran pemerintah juga memiliki belanja. Belanja adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota (Ramli, 2016: 8).

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengenai badan layanan umum. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi ekonomi untuk

pemerintahan daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga (Ramli, 2016: 22). Analisis pengukuran belanja dapat diukur menggunakan rasio keuangan.

Rasio pertumbuhan belanja adalah untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Maka dari itu, pemerintah daerah harus mengendalikan belanja daerah dengan melakukan efisiensi belanja (Mahmudi, 2010: 142). Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan oleh rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100 %, sebaiknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010: 152).

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Selisih anggaran belanja dikategorikan selisih wajar (*favourable variance*) apabila realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya, dan dikategorikan selisih tidak wajar (*unfavourable variance*) apabila realisasi belanja lebih besar dari anggarannya (Mahmudi, 2010: 157). Rasio keserasian belanja adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi dan

belanja modal yang digunakan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Yoyo, 2017: 14-15).

Rasio aktifitas adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal (Ramli, 2016: 140). Rasio pertumbuhan adalah rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi- potensi mana yang perlu mendapat perhatian (Ramli, 2016: 143).

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (Indra, 2016).

Siklus belanja daerah mencakup berbagai proses dan keputusan untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah termasuk dinas dan instansi pemerintah daerah. Transaksi-transaksi dalam siklus belanja daerah ini sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Indra, 2010: 105).

Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi 1) Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. 2) Belanja modal meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan serta belanja aset tetap lainnya. 3) Belanja tidak terduga seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah (Bambang, 2017: 133).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Indra, dkk (2016) yang berjudul Analisis Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012 - 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efisiensi belanja pada tahun 2012 - 2014 pemerintah kabupaten Minahasa terjadi efisiensi penggunaan anggaran dan pemerintah kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan belanja dari tahun 2012 - 2014. Penelitian sejenis dilakukan oleh Ika (2018) yang berjudul Analisis Anggaran Belanja Daerah sebagai Alat Pengendalian pada BPKAD Kabupaten Bombana Tahun 2015 - 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada tahun 2015 dan 2016 dikategorikan menguntungkan (*favorable*) karena jumlah realisasi lebih sedikit dibandingkan dengan anggaran belanja daerah yang telah direncanakan, sehingga dapat dikatakan bahwa BPKAD Kabupaten Bombana telah mampu melakukan efisiensi belanja.

Tabel I.1
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Palembang
(Dalam Rupiah)

Tahun	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
2011	Belanja operasi	1.609.034.119.477	1.511.307.630.533	93,93
	Belanja modal	475.332.690.100	358.928.949.198	75,51
	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	1.554.000.000	155,40
	Total belanja daerah	2.085.366.809.577	1.871.790.579.731	89,76
2012	Belanja operasi	1.826.819.530.978	1.714.590.149.680	93,86
	Belanja modal	460.230.193.660	397.764.043.754	86,43
	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	283.910.000	14,20
	Total belanja daerah	2.289.049.724.638	2.112.638.103.434	92,29
2013	Belanja operasi	2.138.200.073.222	1.956.326.634.829	91,49
	Belanja modal	716.492.056.956	678.418.238.179	94,69
	Belanja tidak terduga	4.000.000.000	1.962.686.375	49,07
	Total belanja daerah	2.858.692.130.178	2.636.707.559.383	92,23
2014	Belanja operasi	2.463.347.912.208	2.192.485.631.131	89,00
	Belanja modal	688.385.455.840	618.886.821.696	89,90
	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	1.092.920.533	54,65
	Total belanja daerah	3.153.733.368.049	2.812.465.373.360	89,18
2015	Belanja operasi	2.490.866.582.314	2.238.917.065.119	89,89
	Belanja modal	653.577.633.689	628.995.346.843	96,24
	Belanja tidak terduga	2.000.000.000	837.948.505	41,90
	Total belanja daerah	3.146.444.216.003	2.868.750.360.468	91,17
2016	Belanja operasi	2.555.026.150.570	2.335.937.833.701	91,43
	Belanja modal	812.338.278.189	577.697.336.830	71,12
	Belanja tidak terduga	1.000.000.000	992.817.099	99,28
	Total belanja daerah	3.369.864.428.760	2.915.966.125.847	86,53
2017	Belanja operasi	2.489.421.736.518	2.283.607.852.669	91,73
	Belanja modal	889.936.798.165	857.095.134.848	94,42
	Belanja tidak terduga	2.650.000.000	64.000.000	2,42
	Total belanja daerah	3.383.208.534.684	3.141.848.658.597	92,37

Sumber : BPKAD Kota Palembang, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 diketahui adanya fenomena bahwa belanja daerah Kota Palembang selama 7 tahun dari tahun 2011 sampai 2017 mengalami ketidakstabilan belanja daerah. Belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi pada tahun 2011-2014 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2015-2017 mengalami kenaikan.

Belanja modal dan belanja tidak terduga pada tahun 2011- 2017 mengalami kenaikan dan penurunan atau ketidakstabilan belanja.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terealisasinya anggaran belanja daerah menunjukkan anggaran belanja daerah Kota Palembang tahun 2011 – 2017 sudah baik atau efisien, akan tetapi tidak terealisasinya anggaran belanja 100 % menyebabkan anggaran belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga perlu dilihat dari keserasian belanja, aktifitas, varians dan pertumbuhan belanja, sehingga dapat dilihat bagaimana kinerja belanja pemerintah dalam pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Kota Palembang terhadap masyarakatnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian mengenai **Analisis Pengukuran Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Belanja pada BPKAD Kota Palembang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisis pengukuran belanja daerah dalam meningkatkan kinerja belanja pada BPKAD Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengukuran belanja daerah dalam meningkatkan kinerja belanja pada BPKAD Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang analisis pengukuran belanja daerah dalam meningkatkan kinerja belanja pada BPKAD Kota Palembang.

2. Bagi Pemerintahan Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan untuk memperbaiki dalam menyempurnakan pelaporan keuangan pemerintah Kota Palembang.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi serta dapat menambah wawasan dan menjadi sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anatasiah Friska Palilingan, Harijanto Sabijono dan Lidia Mawikere (2015). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal Emba*, 3 (1) .Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/6558-12808-1-SM.pdf
- Baldric Siregar (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Bambang Supriyadi, Dadang Suwanda dan Agung Manghayu (2017). *Kebijakan Akuntansi Akrua Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fransiskus X.W Katit dan Sherly Pinantik (2016). Analisis Kinerja Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asmat Provinsi Papua. *Jurnal Emba*. 4(3) Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/14291-28540-1-SM.pdf
- Ika Maya Sari, Mulyati Akib dan Anggini Shesilia (2018). Analisis Anggaran Belanja Daerah sebagai Alat Pengendalian pada Badan Pengendalian Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*,3(1). Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/9761-Article Text-3775-10745-1-PB.pdf
- Indra Bastian (2010). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Konsep untuk Pemerintah Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Indra Chirstian Lontaan dan Sonny Pangerapan (2016). Analisis Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal Emba*, 4 (1) .Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/9761-Article Text-2960-ID-analisis-belanja-anggaran-2012-2.pdf
- Machelino Daling (2013). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Emba*. 1(3) Diakses pada tanggal 22 Februari 2019, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/1942-3553-1- SM.pdf
- Mahmudi (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

- Mardiasmo (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mirki Vici S. Tenda, Harijanto Sabijono dan Victorina Z. Tirayoh (2014). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010- 2012. *Jurnal Emba*. 2(1) Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/4378-8411-1-SM.pdf
- Nur Achmad Budi Yulianto, Mohammad Maskan dan Alifiulahtin Utaminingsih (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Malang : POLINEMA PRESS.
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No.21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri No.13 tahun 2006.
- Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 02 Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Menuju Akrual.
- Ramli Faud (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syurtika Mira Lamboan, Ventje Ilat dan Inggriani Elim (2014) Analisis Belanja Langsung pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Emba*. 2(3) Diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, dari file: D:/Users/Acer/Documents/Kumpulan Jurnal/5735-11153-1-SM.pdf
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru.
- V. Wiratna Sujarweni (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta : PT Pustaka Baru.

Wempy Banga (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Windhu Putra (2018). *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok : PT Raja Grafindo Persada Ghalia Indonesia.

Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif dan Nunung Ayu Sofiati (2017). *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta : Andi.